

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN**  
**(Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar**  
**di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas dan Ilmu Pendidikan

Oleh:

**Muhammad Richo Saputra**

**A220100109**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN  
(Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar  
di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen)**

**PUBLIKASI ILMIAH**


Oleh:

**Muhammad Richo Saputra**

**A220100109**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Pembimbing I,



Drs. Ahmad Muhibbin, M. Si.  
NIK. 411

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN  
(Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar  
di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen)**

Oleh:

**Muhammad Richo Saputra**

**A220100109**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari, tanggal: 18 Desember 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji

1. Dr. Ahmad Muhibbin, M. Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Sri Afiah, SH. M. Pd  
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dra. Sundari, SH. M Hum  
(Anggota II Dewan Penguji)


Dekan





**(Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M. Hum)**

**NIP. 19650428 199303 1001**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta,  
Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Richo Saputra**

**A 220100109**

## **IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA SISWA MISKIN (Studi Kasus Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen).**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Gondang Sragen. Penelitian mengacu pada aspek terciptanya kebijakan yang lebih baik atas kemajuan-kemajuan, mengetahui sejauhmana kewajiban dari pelaku yang telah dipenuhi, dan mencuatkan masalah yang selama ini terlupa, terabaikan, dan ditinggalkan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau narasumber, tempat dan peristiwa, serta dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Prosedur penelitian ini ada tiga tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap observasi penelitian, dan tahap wawancara. Untuk menguji data dengan cara triangulasi sumber dan teknik. Untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Sragen adalah terealisasinya Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yang memiliki beberapa mekanisme yang wajib untuk dilaksanakan. Mekanisme tersebut antara lain melalui mekanisme pengusulan, mekanisme penetapan penerima, dan mekanisme penyaluran. Kendala dalam implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar adalah komunikasi, modal, dan informasi yang masih dirasa kurang. Dari internal sekolah dirasakan kerjasama antar guru, bendahara, dan admin telah sesuai dengan tugasnya dalam mengimplementasikan hak pendidikan untuk siswa miskin, namun ada kendala yang bersal dari luar sekolah, yaitu dari lembaga penyalur lainnya. Solusi dalam mengatasi kendala implementasi hak pendidikan adalah koordinasi komunikasi antara tingkat pusat, provinsi, sekolah, dan lembaga penyalur, Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan sebagai pemantauan distribusi penggunaan dana.

**Kata Kunci:** *Hak pendidikan, siswa kurang mampu, Program Indonesia Pintar*

### **ABSTRACT**

*The study aims to know how the implementation of education rights of the poor students through the realization of Smart Indonesia (Indonesia Pintar) Program in SMA Negeri 1 Gondang Sragen. The study refers to the aspect of better policy of some progress, to know how far the doer obligation fulfilled and emerge the ignored problem, forgotten and neglected. The data of the study are collected from the interviewer, place and event, and documentation. The data are collected by interview, document, and observation. The procedure of the study is through three steps, namely pre-field, research observation, and interview steps. The data are tested by triangulation of source and technique. The data are analyzed by applying model of interactive analysis through data collection, data reduction, presenting and*

*concluding/verification. The result of the study shows that the implementation of education rights on the poor students in SMA Negeri 1 Gondang Sragen is the realization of Smart Indonesia (Indonesia Pintar) Program by Smart Indonesia Card (Kartu Indonesia Pintar) having several mechanisms which must be conducted. The mechanisms are proposing, determining the receiver, and distributing. The problems faced in implementing the education rights on the poor students through program of Indonesia Pintar are communication, capital, and less information. From the internal school, the cooperation among teachers, treasure, and administration have been suitable with their duty in implementing the education rights on the poor students. However there is problem from outside the school, that is the other distributor. The solution to solve the problem is communication coordination between the government, province, school, and distributor, and the monitoring of PIP (Smart Indonesia Program) internally must be done to monitor the use of the cash.*

**Keyword:** *Education right, poor students, Program Indonesia Pintar (Smart Indonesia Program)*

## **1. PENDAHULUAN**

Manusia dalam menjalani kehidupan mengalami tumbuh dan kembang di berbagai macam lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran manusia dalam menjalani kehidupan melahirkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi maupun dilaksanakan. Hak dan kewajiban sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM). UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: “HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sejak pertama dilahirkan manusia belum memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan dan melindungi harkat dan martabatnya, sehingga pendidikan mutlak diperlukan untuk menguasai berbagai kompetensi yang diperlukan dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya.

Pemerintah Indonesia secara formal telah berupaya dalam meratakan pendidikan, salah satu langkah yang telah ditempuh antara lain mengeluarkan kebijakan berupa program beasiswa. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, contohnya adalah dengan adanya program BOS

untuk pendidikan dasar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar, tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti dan melanjutkan jenjang sekolah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) mengatakan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pasal 11 ayat (2) memperkuat penjelasan tersebut bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), peneliti merasa antusias untuk mengadakan penelitian terhadap program pemerintah yang sedang diimplementasikan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan untuk siswa kurang mampu dalam menempuh maupun meneruskan pendidikan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kurikulum Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan Standar Kompetensi (SK) adalah menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) yaitu menganalisis upaya dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tempat dan Waktu Penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 jenis penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian kualitatif karena meneliti kondisi yang alamiah tanpa adanya manipulasi untuk mendeskripsikan serta menganalisis peristiwa. Menurut Arifin (2011:29), Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai kondisi objektif di

lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.

Desain penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Sukmadinata (2011:61-66), studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap suatu sistem yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus-kasus.

Subjek penelitian ini adalah siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen. Objek dalam penelitian ini meliputi hak mendapatkan pendidikan pada masyarakat miskin di SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Sragen.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah Peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data meliputi informasi dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1 Implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Sragen adalah terealisasinya Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Dalam memenuhi kewajibannya SMA Negeri 1 Gondang Sragen memiliki beberapa mekanisme yang wajib untuk dilaksanakan. Mekanisme tersebut antara lain melalui mekanisme pengusulan, mekanisme penetapan penerima, dan mekanisme penyaluran.

3.2 Kendala dalam implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar adalah komunikasi, modal, dan informasi



yang masih dirasa kurang. Dari internal sekolah dirasakan kerjasama antar guru, bndahara, dan admin telah sesuai dengan tugasnya dalam mngimplementasikan hak pendidikan untuk siswa miskin, namu ada kendala yang bersal dari luar sekolah, yaitu dari lembaga penyalur lainnya dalam hal ini adalah Bank yang belum bisa mencairkan dana PIP walaupun siswa telah membawa surat keterangan dari sekolah dalam rangka pengambilan dana PIP. Hambatan yang lain adalah dalam penggunaan dana PIP yaitu kurangnya pengawasan yang dalam penggunaan dana PIP yang telah dicairkan oleh peserta didik.

3.3 Solusi dalam mengatasi kendala implementasi hak pendidikan adalah koordinasi komunikasi antara tingkat pusat, provinsi, sekolah, dan lembaga penyalur, Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan sebagai pemantauan distribusi penggunaan dana.

#### **4. PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasi hak pendidikan pada siswa miskin di SMA Negeri 1 Gondang Sragen adalah terealisasinya Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Dalam memenuhi kewajibannya SMA Negeri 1 Gondang Sragen memiliki beberapa mekanisme yang wajib untuk dilaksanakan. Mekanisme tersebut antara lain melalui mekanisme pengusulan, mekanisme penetapan penerima, dan mekanisme penyaluran. 2) Kendala dalam implementasi hak pendidikan pada siswa miskin melalui realisasi Program Indonesia Pintar adalah komunikasi, ,modal, dan informasi yang masih dirasa kurang. Dari internal sekolah dirasakan kerjasama antar guru, bndahara, dan admin telah sesuai dengan tugasnya dalam mngimplementasikan hak pendidikan untuk siswa miskin, namu ada kendala yang bersal dari luar sekolah, yaitu dari lembaga penyalur lainnya dalam hal ini adalah Bank yang belum bisa mencairkan dana PIP walaupun siswa telah membawa surat keterangan dari sekolah dalam rangka pengambilan dana PIP. Hambatan yang lain adalah dalam penggunaan dana PIP yaitu kurangnya pengawasan yang dalam penggunaan dana PIP yang telah

dicairkan oleh peserta didik. 3) Solusi dalam mengatasi kendala implementasi hak pendidikan adalah koordinasi komunikasi antara tingkat pusat, provinsi, sekolah, dan lembaga penyalur, Pengawasan PIP secara internal perlu dilakukan sebagai pemantauan distribusi penggunaan dana

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.